

**THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON
FISCAL STRESS IN JAMBI PROVINCE**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP FISCAL STRESS DI PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Marya Ulfa Q¹ Haryadi² Muhammad Gowon³

¹Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Jambi – Indonesia

²Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

^{2&3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

Email: mulfaqalbi@gmail.com¹, haryadi@unja.ac.id², gowon@unja.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of Local Own Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) on fiscal stress in districts and cities in Jambi Province for the 2015-2018 period. The sample of this research is 9 districts and 2 cities in Jambi Province for the period 2015-2018 which may have 44 indicators. This research is a quantitative research and the data in the study uses secondary data so that the data analysis tools in this study use descriptive statistics, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The hypothesis in this research is that Local Own Revenue (PAD) affects fiscal stress, the General Allocation Fund (DAU) has an effect on fiscal stress and Regional Original Income (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) together have an effect on fiscal stress. However, the results showed that PAD and DAU had no effect either partially or simultaneously on fiscal stress.

Keywords: Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Fiscal Stress, Financial Performance, and Regional Autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tekanan keuangan (*fiscal stress*) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Sampel penelitian ini yaitu 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018 yang berjumlah 44 indikator. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dalam penelitian menggunakan data sekunder sehingga alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hipotesis pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *fiscal stress*, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap *fiscal stress* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Namun hasil penelitian menunjukkan PAD dan DAU tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap *fiscal stress*.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Tekanan Keuangan (*Fiscal Stress*), Kinerja Keuangan, dan Otonomi Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan yaitu hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang membuat Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan reformasi ini disebut dengan otonomi daerah. Dalam memberlakukan otonomi daerah, Pemerintah memutuskan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisi tentang pemerintah memberikan kewenangan otonomi kepada masing-masing daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih efisien. Namun di sisi lain, akibat kebijakan ini dimungkinkan dapat menjurus pada disparitas (ketimpangan) yang tinggi di setiap daerah.

Untuk melihat tingkat pencapaian realisasi dari tujuan tersebut dalam penelitian oleh Ayu, dkk (2019) menyatakan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang handal untuk mencapai tujuan otonomi daerah, tetapi juga harus didukung dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang memadai. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah ini dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu pedoman dalam menilai kemampuan kinerja keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah melalui pendanaan utama. Dalam era otonomi ini, kinerja Keuangan Pemerintah dapat dilihat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap semesternya. Dalam upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai bagian utama dalam penyusunan APBD dan juga berupaya meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, dalam menanggapi kesenjangan ini pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya. Pemberian dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah).

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tuntutan kemandirian daerah yang tinggi dalam era otonomi agar daerah mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskal dalam rangka ternyata menimbulkan persoalan baru bagi daerah, yaitu tekanan fiskal (*fiscal stress*). Arnett (2012) menyebutkan tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal, namun lebih lanjut Arnett (2012) menjelaskan *fiscal stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tekanan keuangan (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Hanif (2017) juga mengatakan bahwa tekanan fiskal salah satu hal yang menunjukkan kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggarannya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *Fiscal Stress*.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap *Fiscal Stress*.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berkaitan dengan anggaran suatu daerah yang berfokus pada masalah *fiscal stress* adalah teori dari Peacock dan Wiseman, sehingga *Grand Teori* yang mendasari penelitian ini adalah Teori dari Peacock dan Wiseman. Teori ini muncul karena didasari pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak pada daerahnya, disamping itu masyarakat merasa terbebani dalam pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang seiring berjalannya waktu juga semakin membesar karena meningkat peningkatan dalam penerimaan pajak didasari oleh pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasari teori ini pada situasi dimana masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pada nilai pajak di daerahnya, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat mentoleransi besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas dalam pembangunan untuk daerah mereka sendiri sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan dalam membayar tuntutan pajak. Tingkat toleransi ini menjadi kendala bagi pemerintah, karena dengan adanya toleransi ini pemerintah memiliki peluang untuk menaikkan pemungutan pajak secara sepihak. Maka dalam teori ini terdapat gangguan yang mengakibatkan pajak tidak dapat turun pada tingkat seperti semula, salah satunya efek penggantian, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Efek ini juga dinamakan dengan efek penggantian (*displacement effect*). Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah pinjaman dapat mengatasi pendanaan pada pemerintah, maka timbul kewajiban dalam melunasi utang dan membayar bunga. Hal ini yang menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Dampak lebih lanjut yaitu pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Kejadian ini juga dapat disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek juga disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menimbulkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesobroto : 173) :

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Di sisi lain ada fenomena dimana

penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini disebut *Fiscal Stress*.

2.2. Kinerja Keuangan Daerah

Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Menyangkut dari hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dari definisi di atas, kinerja keuangan daerah juga harus dipertanggungjawabkan, dalam pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah adalah diantaranya:

1. Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi.
2. Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan.
3. Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja.

2.3. *Fiscal Stress*

Dana perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berkembang seiring berjalannya waktu yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan penerapana desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perkembangan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan ini pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melahirkan efektifitas maupun efisiensi di dalam penyelenggaraan keuangan pada pemerintahan. Dengan lahirnya kebijakan tersebut pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengatur dan mengelola sendiri aspek keuangannya, salah satunya dalam hal mengelola anggaran (Hanif dkk, 2017). Pada penelitian Luthfi (2019) mengungkapkan, dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 mengenai adanya kewenangan daerah, memiliki implikasi yang cukup erat terhadap desentralisasi fiskal. Kebijakan baru pada UU ini mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih optimal dan mandiri. Adapun kemandirian dalam otonomi daerah akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata. Pada penelitian Hanif

dkk (2017) menyatakan bahwa, daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami tekanan keuangan atau dapat disebut dengan *fiscal stress*, hal ini dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Arnet (2012) menyebutkan bahwa *Fiscal Stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana tekanan keuangan (*Fiscal Stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Dalam spektrum kondisi keuangan publik, *Fiscal Stress* dapat dikategorikan sebagai kondisi keuangan publik yang lemah (*weak financial condition*).

Terdapat 5 kategori besar pengukuran Fiscal Stress di tingkat daerah (state) yang dikaji oleh Arnett (2012), antara lain: defisit anggaran (budget deficits), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (year-end unreserved budget balance), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (decline in states's revenues performance), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (tax increases relative to spending trends) dan rasio keuangan (financial ratios).

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah "Pendapatan asli daerah, atau disebut juga PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu daerah.

Hal ini juga berlaku pada Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau

fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

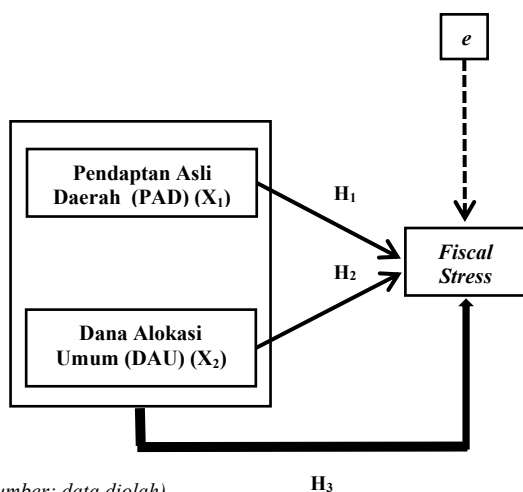
Pemerintah Daerah seiring dengan pemberlakuan daerah otonom sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga pengeluaran pemerintah daerah baik langsung maupun tidak langsung didominasi dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Nyatanya alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari pendapatan asli daerah bukan dari dana perimbangan. Walau pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tentang pengiriman dana transfer (Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan sumber daya alam) telah diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah juga tetap memiliki sumber pendanaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing daerahnya sendiri diantaranya berupa dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan, tentunya

seluruh sumber pendanaan ini diserahkan kepada pemerintah daerah akan kebijakan penggunaannya. Dengan adanya hal ini maka dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini akan diukur dengan satu indikator, yaitu rasio efektivitas DAU. Rasio efektivitas DAU merupakan perbandingan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan target penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (yang dianggarkan). Rasio efektivitas DAU menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan DAU sesuai dengan yang ditargetkan.

2.6. Model Penelitian

Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



(Sumber: data diolah)

Gambar 1. Model Penelitian

2.7. Hipotesis

H1: PAD berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

H2: DAU berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

H3: PAD dan DAU berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota dalam lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jambi periode 2015-2018, dan sampel pada penelitian ini adalah 9 kabupaten dan 2 kota dari keseluruhan populasi yaitu 9 kabupaten dan 2 kota dimana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kabupaten/kota memiliki publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan berturut-turut 2015 hingga 2018.

b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU, indikator *fiscal stress*, dan kinerja keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 9 kabupaten dan 2 kota yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.2. Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta 1 variabel independen yaitu *Fiscal Stress*.

Tabel 1. Operasional Variabel

Definisi/ Variabel	Pengukuran		
	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Efektivitas PAD	$PAD = \frac{PAD \text{ yang direalisasi}}{PAD \text{ yang dianggarkan}}$	Rasio
Dana Alokasi Umum (X ₂)	Efektivitas DAU	$DAU = \frac{DAU \text{ yang direalisasi}}{DAU \text{ yang dianggarkan}}$	Rasio
<i>Fiscal Stress</i> (Y)	<i>Cash Ratio</i>	$CR = \frac{(Kas+Setara Kas+Investasi)/Liabilitas Lancar}$	Rasio
	<i>Quick Ratio</i>	$QR = \frac{(Kas+Setara Kas+Investasi+Piutang)/Liabilitas Lancar}$	Rasio
	<i>Current Ratio</i>	$Current Ratio = \frac{Aset lancar}{Liabilitas lancar}$	Rasio
	<i>Operating Ratio</i>	$Operating Ratio = \frac{Total Pendapatan}{Total Biaya}$	Rasio
	<i>Surplus (Defisit) per Capita</i>	$S (D) \text{ per kapita} = \frac{Total Surplus (Defisit)}{Populasi}$	Rasio
	<i>Net Assets</i>	$Net Assets = \frac{Aset Bersih}{Total Aset}$	Rasio
	<i>Tax per Capita</i>	$Pajak \text{ per kapita} = \frac{Total Pajak}{Populasi}$	Rasio
	<i>Tax per Capita</i>	$Pendapatan \text{ per kapita} = \frac{Total Pendapatan}{Populasi}$	Rasio
	<i>Expense per Capita</i>	$Biaya \text{ per kapita} = \frac{Total Biaya}{Populasi}$	Rasio

(Sumber: data diolah)

3.3. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. *Software* yang digunakan dalam menganalisis data adalah SPSS versi 23.0 (*Statistical Package for Social Science*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 44 data observasi yang berasal dari perkalian antara periode penelitian (4 tahun; dari tahun 2015

sampai 2018) dengan jumlah sampel (11 Kabupaten dan Kota). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	44	,737	1,226	1,01307	,130532
DAU	44	,973	1,122	1,00207	,018917
FS	44	-7,046	14,365	-.00020	3,820727
Valid N (listwise)	44				

(Sumber: data diolah)

1. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap PAD menunjukkan nilai minimum sebesar 0,737, maksimum sebesar 1,226, mean sebesar 1,012, dan standar deviasi sebesar 0,131.
2. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 0,977, maksimum sebesar 1,122, mean sebesar 1,002, dan standar deviasi sebesar 0,189.
3. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap FS menunjukkan nilai minimum sebesar -7,046, maksimum sebesar 14,365, mean sebesar -0,0002, dan standar deviasi sebesar 3,820.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *One Sample Kolmogorov-smirnov Test*. Berikut disajikan hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov Test* pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,66502820
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,082
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,071 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: data diolah)

Hasil pengujian normalitas data dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2- tailed)* sebesar 0,71 yang lebih tinggi dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Adapun hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Uji Multikoneritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	1,000	1,000
DAU	1,000	1,000

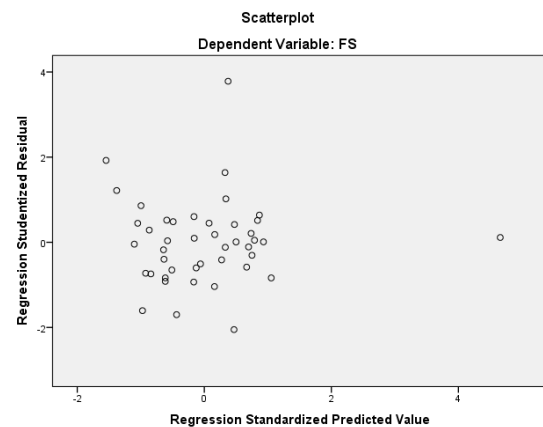
a. Dependent Variable: absres

(Sumber: data diolah)

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tolerance sebesar 1,000, dan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai tolerance sebesar 1,000. Semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 1,000, dan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai variance inflation factor (VIF) sebesar 1,000. Semua variabel bebas memiliki nilai VIF ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.2.3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *scatterplot* dan uji Glejser. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh uji *scatter plot* sebagai berikut:



(Sumber: data diolah)

Gambar 2. Uji Scatter Plot

Hasil uji heterokedastisitas dengan *scatterplot* seperti yang disajikan pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. Guna mempertegas hasil uji heteroskedastisitas maka berikut disajikan hasil uji Glejser seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,824	21,329		,976	,335
PAD	-3,085	3,052	-,155	-1,011	,318
DAU	-15,113	21,061	-,110	-,718	,477

a. Dependent Variable: absres

(Sumber: data diolah)

Hasil uji Glejser pada tabel di atas menunjukkan bahwa sig. untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,318 > 0,05 dan sig. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,477 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,902

(Sumber: data diolah)

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson seperti yang disajikan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai DW sebesar 1,902. Nilai DW lebih besar dari nilai -2 dan lebih kecil dari nilai +2 (-2 < DW < +2), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap *fiscal stress*. Dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-46,906	30,643		-1,531	,134
PAD	5,744	4,385	,196	1,310	,198
DAU	41,002	30,258	,203	1,355	,183

(Sumber: data diolah)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$FD = -46,906 + 5,744PAD + 41,002DAU$$

Penjelasan persamaan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -46,906 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta faktor lain, maka variabel *fiscal stress* (FS) yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018 sebesar -46,906 satuan.
2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai 5,744 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan nilai *fiscal stress* (FS) yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018 tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai 41,002 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan meningkatkan nilai *fiscal stress* (FS) yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018 tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.4. Uji Hipotesis

1. Uji t

Hasil uji t pada penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap *fiscal stress* yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Uji t

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	50,117	2	25,059	1,779	,182 ^b
Residual	577,595	41	14,088		
Total	627,712	43			

a. Dependent Variable: FS

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

(Sumber: Data diolah)

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap *fiscal stress* dengan t-hitung sebesar 1,310 dan nilai signifikansi sebesar 0,198 > 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (**H₁ tidak didukung**).

Hasil pengujian pengaruh dana alokasi umum terhadap *fiscal stress* dengan t-hitung sebesar 1,355 dan nilai signifikansi sebesar 0,183 > 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (**H₂ tidak didukung**).

2. Uji f

Hasil uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap *fiscal stress* yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Uji F

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-46,906	30,643		-1,531	,134
	PAD	5,744	4,385	,196	1,310	,198
	DAU	41,002	30,258	,203	1,355	,183

a. Dependent Variable: FS

(Sumber: Data diolah)

Hasil uji F pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 1,779 dan nilai signifikansi sebesar $0,182 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress* (**H₃ tidak didukung**).

4.5. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R²* pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,283 ^a	,080	,035	3,753355	1,902

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: FS

(Sumber: Data diolah)

Pada tabel di atas hasil uji determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,035 yang mengandung arti bahwa 3,5% besarnya *fiscal stress* dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Variabel Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 96,5% (100% - 3,5%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.6. Pembahasan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi periode 2015-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut yang menyebabkan nilai *fiscal stress* menurun. Pada saat PAD mengalami peningkatan, maka pemerintah akan lebih meningkatkan kontribusi PAD terhadap pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah akan dapat membiayai pengeluarannya dengan PAD yang dimilikinya. Pada saat pemerintah mengalami kondisi *fiscal stress*, maka pemerintah harus mengurangi laju pertumbuhan belanja modal yang tinggi sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan. Negara yang memberikan lebih banyak pilihan kepada pemerintah daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerahnya, mereka cenderung memiliki nilai *fiscal stress* yang rendah. Sehingga pada penelitian ini PAD tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*

2. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Semakin besar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat *fiscal stress* pada pemerintah Kabupaten dan Kota menurun. Selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) bukan berasal dari kreativitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti kreativitas meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) selalu ditentukan berdasarkan perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota

3. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa PAD maupun DAU secara bersama-sama juga tidak mempengaruhi *fiscal stress*, dengan makna lain semakin tinggi PAD maupun DAU yang dianggarkan maka tidak mempengaruhi *fiscal stress*. Sehingga dampak *fiscal stress* dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018, dengan makna lain hanya dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah pada suatu daerah yang diperoleh dari hasil pajak maupun retribusi daerah tidak mampu menggambarkan kondisi tekanan keuangan (*fiscal stress*) di Kabupaten maupun Kota pada Provinsi Jambi dari Tahun 2015 hingga 2018.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018, dengan makna lain dengan adanya dana transfer yang dikirim oleh pemerintah pusat yang salah satunya yaitu dana alokasi umum tidak dapat memperlihatkan gambaran atau kondisi tekanan keuangan (*fiscal stress*) di daerah Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2015 hingga 2018.
3. Secara bersama – sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak

berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018, dengan makna lain tinggi atau rendahnya jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2015 hingga 2018 maupun tinggi atau rendahnya dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk daerah tersebut tidak dapat menggambarkan tekanan keuangan (*fiscal stress*) pada daerah Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 hingga 2018.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan penulis dan atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi keadaan keuangan suatu daerah pemerintah dapat melakukan beberapa langkah dan cara yang baiknya dengan salah satu cara dengan memperhatikan dan mengukur tingkat tekanan keuangan (*fiscal stress*) pada suatu daerah. Sehingga dari salah satu pengukuran ini Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada setiap daerahnya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Perlunya peningkatan dalam pengidentifikasian dana yang dihasilkan oleh masing-masing daerah dan dana yang diberikan oleh pusat kepada daerah hingga penggunaan dari masing-masing dana dengan tetap memperhatikan peningkatan perjalanan proses dari sistem otonomi daerah demi menciptakan kemandirian pada suatu daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti pengaruh variabel – variabel lain tidak hanya dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum namun juga menyertakan pendapatan transfer lainnya seperti Dana Alokasi Khusus dan yang lainnya, serta menambahkan efektifitas dari Belanja Daerah baik dari belanja modal, belanja operasi dan belanja lainnya.
4. Memperbesar jumlah sampel dari penelitian karena pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan sampel dari satu provinsi yang hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh dari peneliti.

DAFTAR REFERENSI

Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sumatera bagian Selatan. Vol. 03 No. 01, Oktober 2015. Sumatera Selatan.

Aladin. 2019. Determinan *Fiscal Stress* Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Vol. 03 No. 01, Januari 2019. ISSN: 2579-969X. Sumatera Selatan.

Aldag dan Warner. 2017. *What Causes Local Fiscal Stress, What Can Be Done About It. State*

Austerity Policy and Creative Local Responsive, May 2017. New York.

- Andirfa, Basri, dan Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Pertimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 05 No. 03, ISSN: 2302-0164, Agustus 2016. Aceh.
- Antari dan Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* Vo. 07 No. 02. Bali
- Anwar, *Analysis the Effect Of Regional Revenue of the Financial Reformance of South Sulawesi Province at the Central Statistic Agency of South Sulawesi*. Jumbo Vol. 03 No. 03, Desember 2019, E-ISSN 2582-4175. Sulawesi Selatan.
- Ayu. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Pertimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Sejava Barat. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* Vol. 03 No. 01, 1 Maret 2018. Kediri
- Budianto dan Alexander. 2016. The Influence of Local Revenue (PAD) and Equalization Funds to the Financial Performance of Regencies /Cities in The North of Sulawesi. *Jurnal EMBA* Vo. 04 No. 04, ISSN 2303-1174, Desember 2016, Sulawesi Utara.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Devita, Jelis, dan Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 02 No. 02, Desember 2014. Jambi.
- Dilger. 2014. *State Government Fiscal Stress and Federal Assistance. Congressional Research Service, 4 February 2014. America.*
- Gorina dan Maher. 2016. *Measuring and Modeling Determinants of Fiscal Stress in US Municipalities, November 2016. Mercatus Working Paper. Virginia.*
- Gorina, Maher, Joffe. 2017. *Local Fiscal Distress: Measurement and Prediction. Article Public Budgeting and Finance, October 2017. US*
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanafi, Mahmud M. 2016. *Manajemen Keuangan Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hanif, dan Suparno. 2017. Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan *Fiscal Stress* terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota di

- Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vo. 02 No. 04, E-ISSN 2581-1002. Aceh.
- Hariani, dan Widyawati. 2020. *The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Efficiency Ratio of Government Independence Performance*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan ISSN 2086-1575. Surabaya.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Lutfhi, Ritchi, dan Yudianto. 2019. Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon *Fiscal Stress*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 10 No. 02, Desember 2019. Bandung.
- Machmud dan Roadjak. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science Vol. 02 No. 01*, Januari 2018, EISSN 2548-3501. Gorontalo.
- Manafe, Ena, dan Adu. 2018. *Fisscal Stress: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Wahana Vol. 21 No. 02, Agustus 2018. Kupang.
- Matande, Faridah, dan Thanawain. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Toraja, *Economics Busuwa Journal s/d Mar*, Makassar.
- McDonald. 2017. *Measuring the Fiscal Health of Municipalities*. Lincoln Institute of Land Policy Working Paper WP17BM, May 2017. Carolina.
- Mondes. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 04 No. 02, ISSN: 2338 -4603, Desember 2016. Jambi
- Muryawan, dan Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stres*, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, ISSN: 2337-3067. Bali
- Novianto dan Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Vol. 04 No. 01, ISSN 2302-7169, Juni 2015. Kalimantan Barat.
- Septira dan Prawira. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 07 No. 01, Juni 2019. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumner dan Berti. 2017. *Akiner Complementary Tool to Monitor Fiscal Stress in Eurepean Economies*. European Commision Discussion Paper 049 ISSN 2443 -8022, June 2017.
- Syukri dan Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan. Vol. 02 No. 02, September 2019, ISSN: 2615-5950. Sulawesi Selatan.
- Vanesha, Rahmadi, Parmadi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14 No. 01, Juni 2019, ISSN: 2085-1960. Jambi.